

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Ikhsan Maulana Arief

NPP. 31.0308

Asdaf Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : ikhsanmaulanaa29@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Romli Arsyad, SH., M.Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by the low level of activation of Digital Population Identity in Bandar Lampung City due to the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of services to the community, low public awareness and understanding of the Digital Population Identity activation flow and the lack of employees in activation activities Digital Population Identity. **Purpose:** This research aims to determine the ownership of Digital Population Identity activation, the obstacles faced in owning Digital Population Identity activation, as well as the strategy of the Department of Population and Civil Registration in ownership of Digital Population Identity activation in Bandar Lampung City. **Method:** . This research uses a research design with descriptive qualitative methods and an inductive approach. **Results:** Based on research conducted by researchers, the Population and Civil Registration Service's strategy in activating Digital Population Identity has been implemented according to the strategy but has not been optimal. This is because there is still one dimension that does not fully match the strategy, namely the resource support strategy dimension. **Conclusion:** in overcoming obstacles to the activation of Digital Population Identity, namely in the form of providing facilities and infrastructure, efforts to activate Digital Population Identity by utilizing the latest innovations, namely WhatsApp video calls and pick-up and drop off in sub-districts and sub-districts as well as providing education and employee training.

Keywords: Strategy, Digital Population Identity, Resident Identity Card

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, rendahnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat terhadap alur aktivasi Identitas Kependudukan Digital serta kurangnya jumlah pegawai pada kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, hambatan yang dihadapi dalam kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, serta strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kota Bandar Lampung. **Metode** : Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif. **Hasil/Temuan**: Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah terlaksana sesuai strategi tetapi belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat satu dimensi yang belum sesuai strategi sepenuhnya yaitu dimensi strategi pendukung sumber daya. **Kesimpulan**: dalam mengatasi hambatan terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu berupa pengadaan sarana dan prasarana, upaya aktivasi Identitas Kependudukan Digital dengan memanfaatkan inovasi terbaru yaitu dengan videocall Whatsapp dan jemput bola di kelurahan dan kecamatan serta pengadaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Kata Kunci: Strategi, Identitas Kependudukan Digital, Kartu Tanda Penduduk

I. Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki populasi penduduk peringkat empat di dunia sesudah China, India, dan Amerika Serikat (USA). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 telah menduduki angka 278,69 juta jiwa (BPS, 2023). Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, permasalahan yang ada pada pemerintahan menjadi semakin kompleks dan luas seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan meningkat. Untuk mengatasi permasalahan yang semakin beragam, pemerintah harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu penerapan pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan publik khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). KTP-el merupakan metode baru yang efektif yang digunakan oleh pemerintah dengan menyusun basis data kependudukan untuk memberikan identitas dengan menggunakan sistem biometrik yang terintegrasi di dalamnya.

Dikutip dari kupastuntas.co, keterbatasan blangko KTP-el menjadi permasalahan utama dalam pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena ketersediaan blangko KTP-el dari pusat terbatas, Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, menurutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung perlu menerapkan sistem Identitas Kependudukan Digital tersebut guna mengantisipasi habisnya blangko untuk perekaman KTP-el. (jaya, 2023).

Dikutip dari dukcapil.kemendagri.go.id target di tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Prof. Zudan adalah di seluruh Indonesia, ada berbagai rencana untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Kemudian, beliau mengatakan bahwa setengah dari penduduk yang ditargetkan di pulau Jawa dan Bali sudah memiliki KTP-el digital. Sementara Sumatera dan Sulawesi 30 persen, Kalimantan 20 persen, dan Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat sebanyak 10 persen. Aktivasi Identitas Kependudukan digital di Kota Bandar Lampung masih

tergolong rendah. Menurut laporan harian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung per Senin, 16 Oktober 2023 sebanyak 72.007 warga Bandar Lampung telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (Dukcapil Kota Bandar Lampung, 2023).

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah berjalan 10,44% dari total 752.115 perekaman KTP-el sehingga jumlah tersebut masih dibawah target pemerintah bahwa target aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini harus mencapai 25 % dari jumlah perekaman KTP-el. Sebanyak 680.108 penduduk wajib KTP-el belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan ketersediaan sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Dalam hal ini, smartphone berbasis Android adalah sarana utama yang diperlukan untuk membuat dan memiliki Identitas Kependudukan Digital dan produk Iphone yang belum bisa mengakses versi IOS. Sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung. Faktor seperti kesadaran masyarakat yang rendah salah satunya. Cukup banyak masyarakat yang masih menganggap aplikasi IKD masih belum diperlukan. Kurangnya sosialisasi dan kekurangan pegawai dalam aktivasi IKD juga menjadi salah satu rendahnya aktivasi IKD di Kota Bandar Lampung.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi administrasi kependudukan. Penelitian oleh Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman (2023) menemukan bahwa perlunya memberikan informasi secara kontinu untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital dan keuntungan dari menggunakannya sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Penelitian oleh Nurlika Isnovianti (2023) menunjukkan bahwa pendekatan organisasi berkisar pada visi dan misinya, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Industri Kreatif dan inisiatif terkait. Di antaranya program pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja, serta pengembangan homestay dan penerapan Petunjuk Teknis CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment). Penelitian oleh Natasya Nur Aulia dan Dida Rahmadanik (2023) menemukan bahwa pelayanan KTP Digital dimulai pada bulan April tahun 2023 dan dapat diakses di balai RW sekitar. Hal ini dilakukan karena tingginya minat masyarakat untuk mengaktifkan KTP Digital. Penelitian oleh Rena Maulidiana (2020) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, melalui pemanfaatan Kredit Sahabat (KRABAT) dari tahun 2017 hingga 2018, Strategi Pemerintah Desa dan Penyelenggara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labuan Mapin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi petani setempat. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti strategi komunikasi, strategi program, strategi program sumber daya, dan strategi kelembagaan. Penelitian oleh Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023) menunjukkan bahwa efektivitas program layanan Digital Resident Identity di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya : 1) terjadi peningkatan antusiasme warga dalam mengaktifkan Identitas Kewarganegaraan Digital. 2) Kelurahan Kandangan, Ketua RT dan RW, serta Pemerintah Kota Surabaya Tim Kependudukan dan Catatan Sipil pun turut serta melakukan sosialisasi informasi tentang layanan Identitas Kependudukan Digital di Desa Kandang. 3) penduduk Desa Kandangan secara bertahap beralih

dari KTP fisik ke KTP digital yang tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat transaksi layanan dalam bentuk digital. 4) Kelurahan Kandangan tim dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya telah memantau program layanan Identitas Kependudukan Digital di Desa Kandangan. Penelitian oleh (Putri Rivalisa, 2022), Helmi, dan Wais Alqarni (2022) menemukan bahwa strategi BPKS pertama adalah melakukan kerja sama dan investasi jangka panjang, namun dalam pelaksanaannya BPKS belum optimal dalam mengupayakan kerja sama dan investasi terkait pengembangan sektor pariwisata selama masa pandemi ini. Kedua, meningkatkan kualitas SDM BPKS, namun faktanya SDM BPKS belum mampu menciptakan program inovatif terkait pengembangan pariwisata yang mendukung selama pandemi COVID-19. Ketiga, melakukan pembenahan aset milik BPKS. Keempat, promosi via online melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, Youtube, dan Website milik BPKS. Namun dalam pelaksanaannya promosi yang dilakukan oleh BPKS tidak berjalan dengan optimal. Penelitian oleh Syafa Armia dan Diana Hertati (2023) menemukan bahwa setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian oleh Vivtania Salsa Bella dan Djoko Widodo (2023) menemukan bahwa . Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan implementasi IKD ini dibantu dengan pemerintah yang ada di kecamatan serta kelurahan, seperti di Kecamatan Tambaksari. Proses implementasi IKD di kecamatan Tambaksari memperhatikan aspek dari teori implementasi George C. Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Penelitian oleh Rania Riska Vindy Aprilia dan Kalvin Edo Wahyudi (2023) menemukan bahwa kebijakan mengenai pelayanan aktivasi IKD di balai-balai RW Kelurahan Kalirungkut belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Kenyataannya, implementasi kebijakan program pelayanan IKD masih belum berjalan secara optimal. Penelitian oleh Rifani Adiatma (2022) menemukan bahwa strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dalam pengurangan risiko bencana banjir bahwa dalam beberapa indikator telah terlaksana dengan baik. Namun, masih terdapat kekurangannya yang krusial yaitu kelembagaan dari BPBD Kota Banjarmasin membuat program – program kebencanaan kurang bisa dilaksanakan dengan lancar hal ini juga dikarenakan Pemerintah Kota Banjarmasin kurang memperhatikan instansi kebencanaan karena merasa bencana yang dampaknya besar jarang terjadi di Kota Banjarmasin.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung. Selain itu strategi yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Kooten (Salusu) yang menyatakan bahwa Strategi yang diukur dengan indikator Corporate strategy (strategi organisasi) Program Strategy (strategi program) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)

1.5 Tujuan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, hambatan yang dihadapi dalam kepemilikan aktivasi Identitas

Kependudukan Digital, serta strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

II. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan induktif pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, diharapkan dapat menghasilkan data dan fakta yang aktual dari lokasi penelitian yang dihasilkan dan dikaitkan dengan teori yang sesuai dari fokus penelitian yang dibahas dalam mendeskripsikan dan menganalisis strategi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Creswell, 2015). Moelong (2013: 10) menyatakan bahwa “Analisis secara induktif merupakan tidak ada tujuan dari upaya pencarian data untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan sebelum penelitian dimulai.”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pendapat dari Miles dkk (2014:31) yaitu Reduksi Data, Data Display (Penyajian Data), dan *Concluding Drawing / Verification* (Menarik Kesimpulan).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung

Identitas Kependudukan Digital adalah suatu digitalisasi untuk mendeskripsikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas dari penduduk.

Manfaat/keuntungan dari Identitas Kependudukan Digital yaitu (a) Pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif dan efisien, (b) Menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el, (c) Tidak ketergantungan pada vendor (d) Tidak memerlukan anggaran khusus (e) Menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik dan dengan fungsinya yaitu (a) pembuktian identitas, (b) otentikasi identitas, (c) otorisasi identitas.

Menurut laporan harian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung per Senin, 16 Oktober 2023 sebanyak 89.993 warga Bandar Lampung telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (Dukcapil Kota Bandar Lampung, 2023).

Berdasarkan data persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah berjalan 11,35% dari total 752.115 perekaman KTP-el sehingga jumlah tersebut masih dibawah target pemerintah bahwa target aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini harus mencapai 25 % dari jumlah perekaman KTP-el. Sebanyak 680.108 penduduk wajib KTP-el belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan ketersediaan sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Dalam hal ini, smartphone berbasis Android adalah sarana utama yang diperlukan untuk membuat dan memiliki Identitas Kependudukan Digital dan produk Iphone yang belum bisa mengakses versi IOS. Sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung.

3.2 Hambatan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung

Beberapa hal yang peneliti dapatkan dari observasi yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki
2. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional untuk diturunkan pada kegiatan sosialisasi
4. Sering terjadi gangguan sinyal saat proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital

3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dianalisis berdasarkan empat karakteristik, sebagai berikut

1. Corporate strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang perlu dilakukan dan untuk siapa.
2. Program strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apakah kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu diluncurkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
3. Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
4. Institutional strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis

Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan langsung saat melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada bulan Januari 2024. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, hambatan yang dihadapi dalam kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, serta strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kepemilikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kota Bandar Lampung. Peneliti menganalisis strategi tersebut melalui jenis-jenis teknik yang mana dikembangkan oleh Kooten dalam buku Salusu yang dengan pandangan Higgins, Wheelen dan Hunger. Menurut Kooten (2004:105) tipe-tipe strategi yang dimaksud yaitu :

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi merupakan strategi yang digunakan dalam menjalankan misi agar tercapainya visi yang telah ditetapkan dan menjadi bagian dari organisasi, biasanya strategi ini disebut sebagai Grand Strategy dikarenakan didasari pada tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dan apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara tidak baik, maka akan berakibat buruk.

A. Tujuan

Tujuan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pernyataan mengenai keadaan yang diinginkan. Pada sebuah organisasi tujuan diartikan sebagai bentuk dari penjabaran dari visi dan misi serta hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi pada kurun waktu tertentu apakah tujuan organisasi tersebut tercapai atau tidak. Salah satu target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yaitu aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebesar 30%.

Target aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebesar 30% dari jumlah perekaman membentuk suatu strategi yang berasal dari organisasi itu sendiri dengan memiliki tujuan yang jelas serta memiliki nilai. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memfokuskan pada pelayanan berbasis *videocall* whatsapp dan jemput bola pada pelayanan Identitas Kependudukan Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya dalam kegiatan peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital tentunya membutuhkan kerjasama dengan baik dengan masyarakat dalam peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melalui penggunaan *videocall* Whatsapp yang tersambung dengan operator Identitas Kependudukan Digital di kantor sehingga penduduk tidak perlu datang dan cukup aktivasi di rumah kemudian pelayanan jemput bola dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke kecamatan, kelurahan dan sekolah yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung sehingga mampu meningkatkan angka aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi pada hakikatnya berkaitan dengan pandangan ke depan organisasi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka waktu yang lama. Bagi sebuah organisasi visi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Hal ini dikarenakan visi berfungsi sebagai penunjuk arah bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam organisasi serta menjadi pedoman bagi anggota organisasi ketika menjalankan kegiatan dalam organisasi.

Tujuan dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini sendiri adalah untuk mencapai target nasional aktivasi dengan 30% dari jumlah perekaman.

2. Strategi Program

Strategi program menjadi suatu rencana atau pola yang digabungkan dengan tujuan dari suatu organisasi. Dalam tahap pembentukan suatu strategi program maka harus dilakukan secara terarah dan terorganisir agar hasil yang ditimbulkan akan maksimal. Program yang dibuat lebih terpusat pada implikasi suatu program, apakah yang akan terjadi apabila program tersebut dijalankan atau diluncurkan oleh sebuah organisasi.

A. Dampak program

Dampak Program dapat dimaknai sebagai suatu akibat dari dilaksanakannya suatu tindakan yang telah dilakukan dengan maksud tertentu. Pada dasarnya setiap organisasi pasti memiliki masing-masing strategi berupa kegiatan ataupun program untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasinya. (Melyani et al., 2022).

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut akan terlihat bagaimana dampaknya. Dampak dapat dimaknai sebagai suatu akibat dari dilaksanakannya suatu tindakan yang telah dilakukan dengan maksud tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat yaitu apakah strategi yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif terhadap instansi atau sarasannya.

Tabel 4. 1

Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Tahun 2023 sejak bulan Juli

Bulan	Jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital
Juli	5.442
Agustus	9.332
September	14.210
Oktober	18.455
November	19.723
Desember	22.831
Jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital	89.993

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan tabel diatas, saat ini aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah mencapai 89.993 orang atau 11 % dari jumlah wajib perekaman KTP-el. Dari tabel diatas dapat dilihat strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kemajuan dalam peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung.

B. Program

Pelaksanaan peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung melalui program-program yang sudah dirancang tentunya membutuhkan kerjasama antara instansi instansi terkait.

Dalam menjalankan suatu program penekanan angka fertilitas tentunya harus melibatkan stakeholder dari TNI/Polri, Kepala Dinas, Camat dan Lurah yang memiliki keterkaitan mengenai peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung agar program yang sudah disusun dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

TNI/Polri, Kepala Dinas, Camat, Lurah memiliki peran yang penting untuk mensosialisasikan tentang pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital kepada pegawainya dan peran penting bagi Lurah untuk turun langsung ke masyarakat untuk melakukan monitoring dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Sumber daya menjadi indikator yang sangat penting dalam sebuah organisasi agar dapat menghasilkan sebuah output ataupun tujuan yang sesuai dengan keinginan organisasi. Strategi sumberdaya digunakan untuk memaksimalkan ketersediaan segala sumber daya yang ada.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu aset atau modal non-material yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari suatu instansi yang merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut. SDM harus terpenuhi dari segi kuantitas dan kualitas atau kompetensi. Hutapea dan Thoha (2018) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung melakukan pelayanan maksimal dengan menurunkan jumlah pegawai dan peralatan penunjang dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara jemput bola di kelurahan ataupun di sekolah sehingga pelayanan tidak terhambat dan bisa berjalan cepat dan maksimal.

Sumber daya manusia dalam pelayanan peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kota Bandar Lampung mempunyai anggota yang sesuai, namun butuh tambahan untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada program jemput bola.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana disebut juga dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas dari instansi daerah maupun pemerintahan daerah.

Dalam proses peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di wilayah Kota Bandar Lampung ini memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional kegiatan penanganan sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penunangan penekanan angka fertilitas meliputi laptop, fingerprint, signature (alat tanda tangan KTP), kamera, M2M dan iris mata.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah ada tetapi masih kurangnya pemahaman akan masyarakat terkait pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi kendala dalam kegiatan jemput bola di kelurahan/kecamatan. Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yaitu dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Telkom terkait sinyal apabila terjadi gangguan sehingga pelayanan bisa maksimal untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital

4. Strategi Kelembagaan

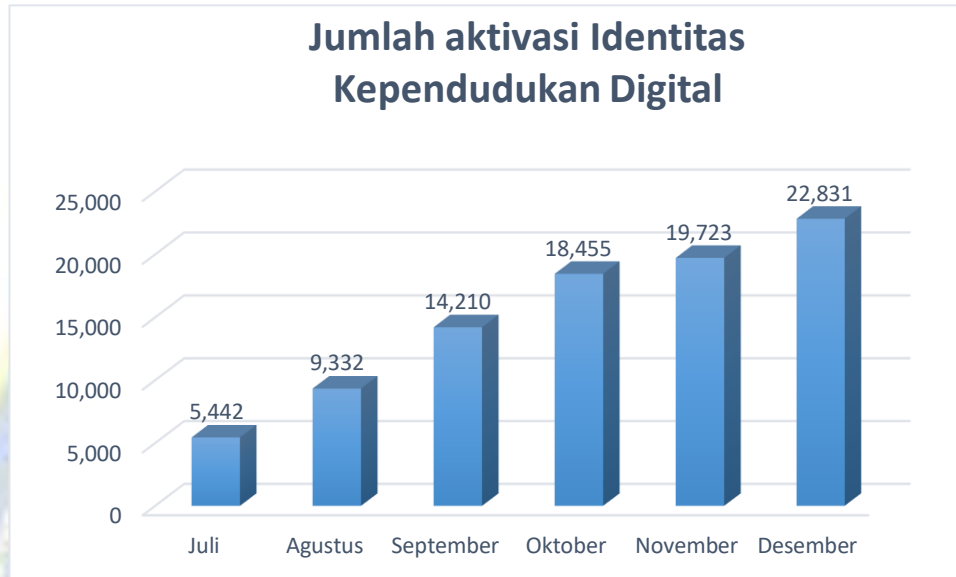
Strategi kelembagaan merupakan strategi yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari organisasi tersebut dalam menyelesaikan sebuah permasalahan..

A. Inisiatif strategi

Menurut Kotten, fokus dari strategi ini adalah mengembangkan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Adapun aspek-aspek yang ingin dilihat dari strategi kelembagaan ini menurut (Melyani et al., 2022) adalah bagaimana organisasi dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan yaitu struktur organisasi, kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan serta memudahkan organisasi atau instansi dalam mengembangkan kemampuannya

untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memiliki strategi kelembagaan dalam peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu dengan memberikan pelayanan gratis melalui *videocall* whatsapp kepada masyarakat dengan memberikan barcode sehingga bisa discan oleh petugas.



Gambar 3.1

Grafik peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan gambar diagram batang diatas bahwa inovasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui jemput bola dan *videocall* whatsapp memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan angka aktivasi karena berdasarkan diagram tersebut terjadi peningkatan aktivasi setiap bulannya.

B. Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi berkaitan kemampuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam memenuhi target aktivasi Identitas Kependudukan Digital dari Kemendagri sebesar 30%. Melalui program jemput bola dan *videocall* whatsapp bisa memenuhi target tersebut. Strategi kelembagaan terkait pelayanan gratis yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dilatarbelakangi oleh kendala bahwa aktivasi Identitas Kependudukan Digital harus di loket pelayanan.

Kunci dari peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus hingga perlahan bisa memenuhi target 30% jumlah perekaman KTP-el di bulan Desember 2024.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bnadara Lampung Provinsi Lampung sudah berjalan baik tapi belum maksimal. Peneliti

menemukan temuan penting yakni adanya kemudahan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Sama halnya, dengan temuan Natasya Nur Aulia dan Dida Rahmadanik bahwa pelayanan Identitas Kependudukan Digital memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya digitalisasi KTP-el (Natasya Nur Aulia dan Dida Rahmadanik, 2023). Hambatan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu rendahnya kesadaran masyarakat hal tersebut juga dikarenakan adanya peralihan secara bertahap penggunaan KTP fisik ke KTP digital pada masyarakat, layaknya temuan Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023) (Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, 2023). Adanya strategi baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital berupa penggunaan videocall whatsapp dan jemput bola langsung kepada masyarakat mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung. Dalam menjalankan suatu program penekanan angka fertilitas tentunya harus melibatkan *stakeholder* dari TNI/Polri, Kepala Dinas, Camat dan Lurah yang memiliki keterkaitan mengenai peningkatan jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung agar program yang sudah disusun dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

3.5 Kesimpulan

1. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang diukur menggunakan teori strategi menurut Kooten (2004:105) tipe tipe strategi yang di maksud yaitu Corporate strategy (strategi organisasi), Program strategy (strategi program), Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya), dan Institutional strategy (strategi kelembagaan) sudah terlaksana sesuai strategi tetapi belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat satu dimensi yang belum sesuai strategi sepenuhnya yaitu dimensi support strategy (strategi pendukung sumber daya).
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap alur aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan kurangnya sumber daya manusia yang profesional untuk diturunkan pada kegiatan aktivasi.
3. Strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hambatan terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu berupa pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, upaya aktivasi Identitas Kependudukan Digital dengan memanfaatkan inovasi terbaru yaitu dengan videocall Whatsapp dan jemput bola di kelurahan dan kecamatan serta pengadaan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk menutupi kekurangan pegawai dalam kegiatan sosialisasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu berupa waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandar Lampung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Michael, M. B. (2014). *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Adiatma, R. (2022). STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *eprints.ipdn*, 1.

<http://eprints.ipdn.ac.id/6728/1/RINGKASAN%20%28RIFANI%20ADIATMA%29.pdf>

Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administras*. Bandung: Alfabeta.

Anisykurlillah, M. A. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 19.

<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6763>

Aprilia, R. R. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RWKelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 19.

<https://www.jurnalstkipmelawi.ac.id/index.php/JDPM/article/view/1179>

Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Armia, S. (2023). PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL. *Dedikasi*, 5.

<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/20049/10414>

Bella, V. S. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksar. *Jurnal SARAQ OPAT*, 14.

<http://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat/article/view/833/626>

BPS. (2023, June `). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. Retrieved from

<https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya. In Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya* (p. 10). Yogyakarta: Gava Media .

Hardiansyah. (2018). *Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Indrajit, R. E. (2004). *Electronic Government*. Yogyakarta: And.

Isnovianti, N. (2023). STRATEGI DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBINA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DI KELURAHAN SUMUR PUTRI. *digilib unila*, 15.

<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68622>

jaya, D. T. (2023, Februari Rabu). *Tersisa 46 Ribu Blangko e-KTP di Bandar Lampung, Disdukcapil siap terapkan IKD*. Retrieved from <https://www.kupastuntas.co/>: <https://www.kupastuntas.co/2023/02/15/tersisa-46-ribu-blangko-e-ktp-di-bandar-lampung-disdukcapil-siap-terapkan-ikd>

Kemendagri, D. (2022, Januari). *Jelang Peluncuran Identitas Digital, Dukcapil Kemendagri Perkuat SDM*. Retrieved from <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>:

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

Maulidiana, R. (2020). STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (STUDY KASUS KREDIT SAHABAT (KRABAT) DESA LABUAN MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2018). *ummat repository*, 5.

<https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1286>

Moenir. (2015). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. In Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: : PT Bumi Aksara.

Permadi, I. B. (2023). IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM UPAYA PENGAMANAN DATAPRIBAD. *JOPPAS:Journal of Public Policy and Administration*, 61.

<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/6199/3712>

Putri Rivalsa, H. H. (2022). STRATEGI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19. *JIM FISIP USK*, 7.

<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/20049/10414>

Rangkuti. (2017). *Analisis SWOT : teknik membedah kasusu bisnis*. Jakarta : PT Gramedia putaka utama.

Rekanza, H. (2020, Juli Kamis).

<https://lampungpro.co/post/29005/diduga-untuk-calon-independen-oknum-rt-kumpulkan-ktp-warga-bawaslu-bandar-lampung-mulai-selidiki>. Retrieved from <https://lampungpro.co/>: <https://lampungpro.co/post/29005/diduga-untuk-calon-independen-oknum-rt-kumpulkan-ktp-warga-bawaslu-bandar-lampung-mulai-selidiki>

Rivalsa, P. (2022). TRATEGI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 12.

<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/20049>

Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo.

Sinaga, E. M. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412238>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarsih, R. d. (2012). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yuhefizar. (2017). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan E-Government di Sumatera Barat*. 2017: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yusuf, N. R. (2019, Januari Rabu).

<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-disdukcapil-bandar-lampung-lambat-dalam-upaya-perbaikan-pelayanan-ktp-elektronik>. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/>: <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-disdukcapil-bandar-lampung-lambat-dalam-upaya-perbaikan-pelayanan-ktp-elektronik>

